

PENANGGULANGAN EKSTREMISME MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi melalui media online berkembang sangat cepat. Tak terkecuali paham-paham keagamaan radikal di Indonesia tumbuh subur. Mereka bebas berekspresi memanfaatkan politik keterbukaan informasi yang bergulir sejak awal reformasi, enam belas tahun terakhir. Bangkitnya era *new media* berbasis internet yang konvergen, semarak jaringan media sosial, karakter komunikasi yang makin cepat dan interaktif, menciptakan iklim makin kondusif bagi tumbuh kembang situs-situs radikal berbasis paham keagamaan.

Di samping konteks eksternal tersebut, dinamika internal kelompok-kelompok ekstrem tersebut, yang salah satu cirinya rentan mengalami friksi internal, juga membuat jumlah dan variasi situs radikal semakin banyak. Dikarenakan perbedaan dalam menyikapi konflik paham-paham ekstrem yang terjadi, perlu penegasan di sini bahwa ekstremisme keagamaan (*religious extremism*) bukan fenomena Islam, namun fenomena keagamaan secara umum. Baik Islam, Yahudi, Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha memiliki fenomena ekstremisme di dalam masyarakat mereka. Bahkan Buddha yang oleh banyak kalangan tidak ekstrim, ternyata kini juga terkait dengan ekstremisme sebagaimana yang terjadi dengan etnis Rohingnya di Burma. Meskipun ekstremisme keagamaan ini *identical* dengan seluruh agama, namun dalam wacana global, ekstremisme keagamaan melekat dan populer dengan Islam setelah Peristiwa 11 September 2001. Fenomena bermunculannya kelompok-kelompok yang beraliran ekstrem dan penyebarannya melalui media sosial perlu ditangani secara sistematis, terstruktur dan massif. Negara harus hadir, karena ini terkait hajat hidup orang banyak. Perangkat *legal policy* untuk menangani paham ekstremisme selama ini sudah berjalan. Tapi lebih dominan pendekatan bidang Komunikasi dan Informatika serta penindakan hukum dengan pemblokiran sejumlah situs yang mengajarkan paham-paham yang berbau kekerasan/ ekstrem.

Dikarenakan situs radikal itu berbasis agama, maka penguatan penanganan berbasis agama juga diperlukan. Dengan demikian, penanganan tidak hanya di hilir, tapi juga di hulu. Penanganan tidak hanya di permukaan, tapi juga di level yang lebih fundamental.

PERAN PEMERINTAH

Apa peran pemerintah? Harus ada pembedaan soal peran (kebijakan) pemerintah yang berkaitan dengan (1) ekstremisme keagamaan dan (2) kekerasan yang muncul karena ekstremisme. Untuk yang pertama, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi ekstremisme keagamaan (*religious extremism*) dipandang relatif. Secara umum, kebijakan pemerintah tentang pengurangan kekerasan sudah

nampak jelas karena kita punya UU anti terorisme. Namun untuk ekstremisme keagamaan belum bisa dikatakan jelas karena jika ekstremisme belum mewujud menjadi tindakan statusnya tidak bisa diapa-apakan oleh hukum kita. Sebetulnya ada mekanisme yang bisa digunakan untuk menanggulangi masalah ekstremisme keagamaan lewat *hate speech* (kebencian) tapi hukum kita belum mengatur masalah itu secara khusus. Meskipun belum berupa tindakan, namun ujaran kebencian ini yang sering kita jumpai dimana-mana. Kita lumrah menemukan di banyak pengajian, tabligh akbar, media sosial dan bahkan di TV-TV yang memuatkan ujaran kebencian atas pihak lain. Ujaran kebencian ini jika terus menerus berlanjut akan mampu memprovokasi masyarakat dan bisa menggiring pada tindakan kekerasan.

Sementara untuk kekerasan berbasis agama seperti terorisme, kebijakan negara sudah cukup memadai dengan adanya UU No. 15/2003 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun kemampuan institusi negara untuk melaksanakan kebijakan tersebut pada tataran praktik masih perlu penyempurnaan. Kekurangan yang paling jelas misalnya adalah adanya kesenjangan antara teori (kebijakan) dan praktik (implementasi) di samping juga persoalan-persoalan seperti kurangnya sumber daya manusia dan budaya etos kerja yang lemah di kalangan penegak hukum.

Salah satu cetak biru dari pemerintah dalam hal penanggulangan kekerasan berbasis agama adalah proyek deradikalisasi. Deradikalisasi adalah kebijakan penting yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi atau mengembalikan radikalisme keagamaan kepada situasi yang normal, tidak radikal. Melalui pendirian BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Pemerintah melakukan program deradikalisasi sebagaimana tercermin dalam fungsi BNPT yang kesembilan: “pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.”Istilah deradikalisasi secara harfiah sudah disebutkan dalam fungsi BNPT.

KONDISI OBYEKTIF

Konten situs ekstrem berbasis agama amat berbahaya. Dalam konteks ancaman terorisme, situs radikal menjadi medium strategis untuk konsolidasi gerakan terorisme, di saat jaringan dan interaksi langsung antar sel teroris semakin tercerai berai akibat operasi anti teror aparat keamanan. Situs ekstrem menyediakan referensi pemahaman keagamaan yang pro ekstrimisme

Proses rekrutmen jejaring teroris atau pengondisian pra rekrutmen banyak terbantu oleh situs-situs ekstrem berbasis paham keagamaan. Penerimaan publik atas aksi terorisme juga berpeluang dibentuk oleh diseminasi konten situs radikal. Bahkan,

petunjuk teknis operasi teror, perakitan senjata dan bom, bisa dipandu secara manual melalui situs internet. Interaksi dan konsolidasi operasi terorisme melalui jaringan dunia maya lebih fleksibel, personal dan interaktif dalam tempo singkat.

Selain aspek terorisme, dalam konteks membangun kehidupan beragama yang berdampingan secara damai, situs ekstrem menjadi ancaman serius, lantaran sikap intoleran dan ujaran kebencian yang mereka pelihara dan sebar. Situs ekstrem berparadigma pengklaim kebenaran sepihak dan intoleran pada kebenaran anutan pihak lain. Baik antar agama maupun antar aliran seagama.

Isu aliran relasi Sunny dan Syiah yang kini tengah memanas kerap dikupas dalam paradigma konflik, bukan paradigma damai. Bahkan, dinamika global di kawasan lain, seperti konflik di Suriah, Yaman dan Irak, dibaca secara simpel sebagai konflik Sunny – Syiah dan dijadikan parameter tunggal untuk mengidentifikasi dan mengadvokasi relasi Sunny dan Syiah di Indonesia. Padahal kontes domestik tak selalu paralel dengan konteks global atau kawasan lain. Situs radikal kerap memanipulasi konflik di kawasan lain untuk memprovokasi konflik domestik.

POLA PENDEKATAN MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam penanggulangan ekstremisme berbasis agama, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan:

- a. Preventif.** Penanganan di hulu. Perlu ditempuh berbagai langkah, yang bersifat lintas sektor dan elemen, kolaborasi kalangan penyelenggara negara maupun non-negara, untuk bersinergi mencegah tumbuh suburnya ekstrimisme. Literasi internet sehat, berupa edukasi masyarakat agar melek media, khususnya media internet, penting dijadikan gerakan nasional, agar pengaruh ekstrim tidak efektif mempengaruhi kesadaran dan opini publik, dan dalam perkembangannya, perilaku/ budaya ekstrem tidak banyak diminati konsumen. Ini adalah bagian agenda pembinaan, penyuluhan dan pendidikan masyarakat. Bukan hanya masyarakat konsumen internet, juga masyarakat produsen konten internet.
- b. Kuratif.** Pencegahan saja tidak cukup. Memperbaiki adalah salah satu upaya untuk bagaimana teknologi informasi/ internet berperan positif didalam memberikan edukasi terhadap paham-paham ekstrim keagamaan dengan melakukan counter/kontra terhadap ajaran-ajaran yang salah/ menyimpang

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

Dari paparan di atas, beberapa program aksi penanganan situs radikal berbasis paham keagamaan yang relevan dengan Kementerian Agama sebagai berikut:

- a. Literasi Internet Sehat Berbasis Agama.** Program ini berupa edukasi publik yang diprioritaskan pada dua elemen: produsen dan konsumen konten internet. Kepada produsen, didorong untuk memperbanyak konten internet berbasis agama yang sehat, tidak radikal dengan segala ciri minor di atas. Kepada konsumen, didorong untuk tidak mentah-mentah menelan konten situs radikal, cerdas mencerna, cermat memilah dan kreatif memberi respon balik. Program ini dijalankan dengan memaksimalkan seluruh elemen dan jaringan birokrasi di lingkungan Kemenag, berkerja sama dengan berbagai ormas Keagamaan. Ribuan penyuluh agama digerakkan sebagai juru literasi internet sehat berbasis agama. Literasi internet sehat anti radikal juga bisa dipesankan dalam taushiyah perkawinan yang banyak dijalankan ribuan penghulu dan KUA.
- b. Gerakan Situs Kontra Radikal.** Kementerian Agama sedang berupaya bersinergi untuk membuat situs kontra radikal berbasis agama yang dikelola berbagai pihak: seluruh kantor Kemenag se-Indonesia, tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai kecamatan (KUA), puluhan Ormas Islam moderat dan sebagian situs radikal yang berbeda haluan dengan situs radikal lain. Saat ini telah dibentuk Tim Cyber Anti Ekstrimisme dan Radikalisme yang beranggota para penyuluh keagamaan di seluruh Indonesia. Demikian juga di lingkungan Perguruan tinggi telah melakukan langkah-langkah berupa kurikulum anti radikal, begitu pula media massa, organisasi jurnalis, dan Dewan Pers. Gerakan ini bisa menjadi kekuatan dahsyat dalam “perang konten” dunia maya.
- c. *Mainstreaming* Opini Kontra Radikal di Media Sosial.** Tidak terbatas situs, jejaring media sosial, seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan sebagainya, juga penting diperhitungkan sebagai wadah dalam membangun gerakan kontra konten situs radikal. Ciri media sosial, antara lain, berisi percakapan informal yang spontan dan interaktif, dan tak kalah efektif dalam pembentukan opini publik. Agenda ini melibatkan tokoh, individu dan komunitas yang aktif menyampaikan opini di jejaring media sosial. Ini penting untuk memperkaya konten internet berbasis agama yang moderat dan sehat, sebagai *counter* terhadap pengaruh situs radikal.
- d. Gerakan Nasional Ramah di Dunia Maya.** Pada akhirnya, seluruh rekomendasi kegiatan di atas, bisa disinergikan sebagai bagian dari sebuah gerakan berskala nasional, untuk mengarusutamakan opini, pemahaman dan informasi tentang paham keagamaan yang ramah, moderat, toleran, dan berbagai karakter non-radikal lainnya, dalam sebuah gerakan yang bisa disebut sebagai “Gerakan Nasional Penanggulangan Ekstrimisme Keagamaan di Dunia Maya”.